

**SKRIPSI**  
**PELAKASANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL BERDASARKAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 01**  
**TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DI**  
**KECAMATAN PANGKALAN KERINCI**



**Oleh**

**ZAKARIA**  
**NIM. 10727000261**

**PROGRAM S1**  
**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**2013**

## ABSTRAK

Tujuan Pembangunan Nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk merealisasikan tujuan dibutuhkan dana yang cukup besar, sehingga Pemerintah terus menggali dana berbagai sektor satu diantaranya adalah pajak. Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Riau. Guna meningkatkan kemampuannya dalam bidang pembangunan, Kabupaten Pelalawan berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Daerah. Salah satu Pajak Daerah meliputi Pajak Hotel yang merupakan sumber penerimaan yang potensial apabila dimaksimalkan.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Pelaksanaan pemungutan pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah?. 2) Faktor penghambat keterlambatan wajib pajak menyetor pajak hotel di kecamatan Pangkalan Kerinci?.

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian yang tergolong kedalam jenis penelitian *Observational Research Survey*. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Pangkalan Kerinci Ibukota Kabupaten Pelalawan khususnya di kantor Dinas Pendapatan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPPKD) Kabupaten Pelalawan. Fokus penelitian adalah (1) Pelaksanaan pemungutan pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah?. (2) Faktor penghambat keterlambatan wajib pajak menyetor pajak hotel di kecamatan Pangkalan Kerinci?.

Sumber data yang diperoleh dari delapan (9) responden dengan alat dan teknik keputakaan data yang diperoleh dari kuesioner dan wawancara kepada responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah berjalan optimal. Pelaksanaan diukur melalui: 1) Dasar Pengenaan/ Penghitungan Dan Tarif Pajak Hotel, 2) Tata cara pembayaran, 3)

Tata cara penagihan, 4) Tata Cara Pengajuan Banding, 5) Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran, 6) Sanksi Administrasi. Hambatannya antara lain kurangnya sumber daya manusia pada wajib pajak untuk menghitung sendiri. Saran Peneliti, untuk Dinas Pendapatan Keuangan Dan Kekayaan Daerah (DPPKD) Kabupaten Pelalawan agar selalu melakukan evaluasi kerja terhadap Pajak Daerah khususnya pajak hotel, kepada wajib pajak hendaklah melengkapi data dan menghitung pajak sendiri dan kepada DPRD Kabupaten Pelalawan agar selalu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alikum Wr.Wb*

Segala puji syukur hanya kepada ilahi Robbi, yang dengan rahmat dan karunia\_Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **PELAKASANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI**. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam yang gelap menuju alam yang penuh dengan cahaya iman dan Islam.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak menghadapi kendala-kendala, namun dengan keridhoan Allah SWT dan do'a maupun motivasi dari semua pihak, maka penulis dapat menghadapinya dengan baik. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan do'a dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu melalui karya ilmiah ini penulis menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua yang tercinta dan terkasih, Ayahanda Saimun dan ibunda Raiyah yang selalu mendo'akan dan memberikan motivasi maupun semangat yang kuat sehingga penelitian ini dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan dan telah mengorbankan kebahagiaannya, memberikan kasih sayang,

perhatian serta senantiasa mendo'akan penulis dalam menuntut ilmu agar menjadi manusia yang patuh dan taat kepada Agama, berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsa.

2. Bapak Prof. Dr. H, M. Nazir Karim, MA, selaku rektor dan para staf yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
4. Ibu Dra. Hertina, M.Pd selaku pembantu Dekan I Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
5. Bapak Muhammad Kastulani, SH,. MH. Selaku pembantu Deakan II Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
6. Bapak Drs, Ahmad Darbi, B, MA, selaku pembantu Dekan III Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
7. Ibu Nuraini Sahu, SH. MH dan Bapak Maghfiroh M,Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum dan seluruh dosen serta karyawan (segenap akademik) Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan penulis ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
8. Bapak muhammad darwis SHI. MH selaku Pembimbing Akademik.
9. Bapak Zulfahmi Nur, M,Ag selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan fikirannya untuk membimbing penulis demi penyelesaian skripsi ini.

10. Terimakasih kepada teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2007, Kanda, adinda dan seluruh keluarga besar beserta teman-teman orang-orang yang tidak bisa disibu satu persatu yang telah mendo'akan dan memberikan motifasi untuk penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran serta masukan-masukan yang mendukung dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini akan diterima dengan senang hati. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Pekanbaru, Mei 2013

penulis

ZAKARIA

10727000261

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iii</b>
<b>Dafatar Isi .....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>viii</b>

### **BAB I : Pendahuluan**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	12
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sisitematika Penulisan.....	17

### **BAB II : Gambaran Umum Kecamatan Pangkalan Kerinci**

A. Profil Singkat Kecamatan Pangkalan Kerinci .....	18
B. Keadaan Geografis dan Keadaan Penduduk .....	19
C. Hotel di Pangkalan Kerinci.....	21

### **BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK HOTEL**

A. Pengertian Pajak .....	23
B. Sistem Pajak di Indonesia .....	29
C. Pemungutan Pajak Daeah.....	31
D. Pengertian Pajak Hotel .....	36

### **BAB IV : Hasil dan Pembahasan**

A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan	
---	--

Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.....	38
B. Faktor Penhambat Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Di Kecamatan Pangkalan Kerinci .....	52
<b>BAB V : Penutup</b>	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59

## **DAFTAR PUSTAKA**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan tonggak baru dalam hubungan pusat dan Daerah. Disebut demikian karena memiliki filosofi dan paradigma yang berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya. Sebagai konsekuensi logis dari perubahan, daerah memiliki kebebasan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah, termasuk dalam pengaturan kelembagaan.

Pelaksanaan pembangunan di daerah baru dapat terlaksana jika adanya penerimaan daerah berupa pendapatan daerah tersebut, oleh karena itu untuk meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah maka salah satunya perlu ada kebijakan-kebijakan yang mengatur penerimaan pajak daerah.

Pemungutan pajak dan pungutan lainnya yang dibebani kepada rakyat yang dilaksanakan oleh pemerintah haruslah berdasarkan kepada undang-undang. Disebutkan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 “Pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.<sup>1</sup> Dengan demikian pemungutan seperti pajak daerah

---

<sup>1</sup> Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945.

dan retribusi daerah haruslah berdasarkan peraturan perundang undangan.

Adapun tujuan pemberian otonomi daerah ini adalah untuk memungkinkan daerah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Disamping itu tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa di Indonesia, terminologi “otonomi” atau “otonomi daerah” telah lazim diberi makna sebagai penyerahan atau pendelegasian wewenang oleh Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah untuk mengatur rumah tangga daerah.<sup>2</sup>

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa “Otonomi Daerah, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Asri M Saleh (ed), *Politea dan Politicos Kuarte Ide-ide Ahli Negara dan Praktisi Politik* (Pekanbaru: Bina Mandiri Press, 2004), h. 60.

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun sumber pendapatan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Hasil Pajak Daerah
3. Hasil Retribusi daerah
4. Hasil Perusahaan Milik Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
5. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
6. Dana Perimbangan
7. Pinjam Daerah
8. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.<sup>4</sup>

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan sangatlah diperlukan dana dalam melaksanakan tugas tersebut salah satu sumber dana itu bersumber dari pajak, oleh karena itu sumber penerimaan negara secara konstitusional diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan termasuk Pajak Daerah.

Menurut Undang-Undang Dasar, hak-hak warga negara ialah;

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

---

<sup>4</sup> Pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo pasal 6 Undang-undang No.33 Tahun 2004.

4. Tiap-tiap negara berhak mendapat pengajaran.<sup>5</sup>

Pajak sebagai salah satu sumber penghasilan Negara, haruslah memberikan pemasukan keuangan sebanyak-banyaknya kepada Negara. Untuk maksud tersebut pajak diatur berdasarkan Undang-undang yang dapat memaksa subyek pajak menunaikan kewajibannya kepada Negara. Hal ini sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 A yang menyebutkan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-undang”.<sup>6</sup>

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.<sup>7</sup>

Peraturan tentang pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksanaannya dengan PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Berdasarkan Undang-Undang dan

---

<sup>5</sup> Asri M Saleh (ed), *Kolaborasi Opini Guru Besar Hukum Tata Negara*, (Pekanbaru: Bina Mandiri Press, 2006) h. 218.

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar 1945 perubahan pertama, Kedua, Ketiga dan keempat.

<sup>7</sup> Marihot P.Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 7.

Peraturan Pemerintah tersebut Pemerintahan Daerah diberi kewenangan untuk melakukan teradap masing-masing jenis pajak<sup>8</sup>

Menurut Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau orang yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>9</sup> Dari bunyi pasal 1 ayat 6 diatas dengan demikian terdapat unsur-unsur pajak daerah sebagai berikut :

- a) Pajak daerah merupakan iuran wajib
- b) Wajib pajak daerah adalah orang perorangan atau badan.
- c) Tidak ada kontra prestasi yang seimbang
- d) Dapat dikenakan secara paksa
- e) Dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>10</sup>

Pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis dan tarif untuk tiap-tiap jenis pajak daerah ditetapkan paling tinggi, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten.

1. Jenis pajak Provinsi terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

---

<sup>8</sup> Syofiarti, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pandapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, (Mahkamah Volume 20 No.1,2008) h. 89.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, *Op.Cit*, Pasal 1 ayat 10.

<sup>10</sup> Syofiarti, *Loc. Cit*

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok
2. Jenis pajak Kabupaten/ Kota terdiri dari:
- a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - g. Pajak Parkir
  - h. Pajak Air Tanah
  - i. Pajak Sarang Burung Walet
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan.<sup>11</sup>

Ketentuan tentang objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.<sup>12</sup>

Pemungutan pajak dan pemungutan lainnya yang dibebankan kepada rakyat yang dilaksanakan oleh pemerintah haruslah berdasarkan Undang-undang yang bersifat memaksa dalam pelaksanaan pungutan tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, *Op.Cit* , Pasal 2 ayat (1) dan (2).

<sup>12</sup> *Ibid.*, Pasal 2 ayat (4).

<sup>13</sup> Pasal 23 A Undang-Undang dasar 1945 .

Dengan demikian pemungutan pajak dan retribusi haruslah berdasarkan Jonto Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bersumber dari Pendapatan Asli Daerah bersumber dari penerimaan berupa perimbangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara beserta pinjaman daerah lainnya.

Pasal 32 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.<sup>14</sup>

Jasa penunjang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.<sup>15</sup>

Yang tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. Jasa sewa apartemen, kondomanium, dan sejenisnya;
- c. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, *Op.Cit*, pasal 32.

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 32 ayat (2).

- d. Jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.<sup>16</sup>

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.<sup>17</sup>

Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.<sup>18</sup>

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.<sup>19</sup>

Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).<sup>20</sup>

Tarif Pajak Hotel ditentukan dengan Peraturan Daerah.<sup>21</sup>

Objek Pajak Hotel yang diamanatkan oleh pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah setiap pelayanan yang disediakan Hotel dengan pembayaran di Hotel.<sup>22</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 32 ayat (3).

<sup>17</sup> *Ibid.*, Pasal 33 ayat (1).

<sup>18</sup> *Ibid.*, Pasal 33 ayat (2).

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 34.

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal 35 ayat (1).

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 35 ayat (2).

<sup>22</sup> pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.



Seiring dengan berkembangnya Pangkalan Kerinci sebagai ibukota Kabupaten Pelalawan dan bertambahnya jumlah pengunjung yang membutuhkan tempat istirahat dan pertemuan maka keberadaan hotel sangat diperlukan, hal ini tentu saja harus didukung dengan fasilitas yang memadai oleh pihak pengelola dalam meningkatkan pelayanan.

Fenomena diatas jelas akan memberikan keuntungan tersendiri bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam menggali sumber pendapatan daerah untuk membiayai pemerintah dan pembangunan dari sektor pajak Hotel, hal ini dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) undang-undang nomo 34 tahun 2004 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Jumlah hotel di pangkalan kerinci sepanjang tahun 2011 adalah 7 (tujuh) dan selebihnya berposisi diluar ibukota Kabupaten Pelalawan, dan penelitian tentang pemungutan pajak hotel ini bersumber pada data tahun 2011.

Klasifikasi dari 7 hotel diantaranya;

1. Hotel Unigraha (Bintang 3)
2. Hotel Melati;
  - a. Hotel Fanbinari
  - b. Hotel Dikayara
  - c. Hotel Meranti
  - d. Hotel Grand
  - e. Hotel Aini
  - f. Hotel Rian

Ketentuan Pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Pelalawan melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, diupayakan berjalan sebaik mungkin oleh Dinas Pengelolah Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan. Dalam ketentuan peraturan diatas telah ditentukan sistem dan prosedur pemungutan dari pajak hotel, antara lain meliputi :

1. Dasar Pengenaan/ Penghitungan Dan Tarif Pajak Hotel.
2. Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah.
3. Tata Cara Penagihan Pajak Daerah.
4. Tata Cara Pengajuan Banding.
5. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pambayaran Pajak Daerah.
6. Sanksi Administrasi.

Tarif pajak hotel menurut pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel adalah 10%, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif pajak hotel yang paling tinggi adalah sebesar 10%, sedangkan besarnya pajak hotel yang terutang oleh wajib pajak hotel dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

Pasal diatas dimaksud menegaskan bahwa setiap pelayanan dihotel dipungut pajak, namun bimbang masih ditemui Wajib Pajak yang tidak membayar objek pajak tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Penagihan pajak hotel oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan dilaksanakan secara manual dengan mengumpulkan data perbulannya dan dihitung berapa jumlah dari pajak hotel tersebut yang diperoleh. Jika wajib pajak terhutang dalam pembayaran pajak, maka pihak penagih mengeluarkan Surat Teguran sebagai surat peringatan.

Berdasarkan uraian diatas penulis melihat adanya efektifitas dari Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah khususnya tentang pajak hotel. Namun tidak hanya dipandang baik dan menguntungkan, masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya tersebut antara lain :

1. Masih ada pihak hotel yang melakukan keterlambatan dalam penyetoran pajak sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Pelalawan nomor 01 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Dengan kata lain rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya dikarenakan sanksi yang kurang berjalan dengan semestinya.
2. Perlunya pengawasan yang lebih oleh petugas wajib pajak terhadap pengusaha hotel.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut, yang penulis tuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul : **Pelakasanaan Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Di Kecamatan Pangkalan Kerinci.**

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan serta tepat dalam melakukan pembahasan dan mudah dipahami, maka penulis membatasi penelitian ini tentang pelaksanaan pemungutan pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan hambatannya sepanjang tahun 2011.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah yang telah diuraikan diuraikan diatas maka peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan pemungutan pajak hotel di kecamatan Pangkalan Kerinci?.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel di Pangkalan Kerinci berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Pangkalan Kerinci.

Selanjutnya manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan menambah pengetahuan penulis yang telah diperoleh dibangku kuliah.
2. Diharapkan dari hasil penelitian ini akan dapat sebagai bahan informasi dan ditemukan hal-hal baru yang selama ini belum mendapat perhatian.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program strata satu di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi yang dianggap paling sesuai dengan keadaan objek penelitian ini, sebagai berikut :

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian lapangan dengan penelitian hukum sosiologis tentang efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

##### **2. Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Pengelolah Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan, karena berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan nomor 01 Tahun 2011, Dinas Pengelolah Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan adalah merupakan

dinas yang diberi wewenang untuk melaksanakan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Pelalawan.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah mengenai Pemungutan Pajak Hotel di Pangkalan Kerinci berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

### 4. Populasi dan sampel

Adapun populasi yang penulis jadikan dalam penelitian ini yaitu, 8 orang pengelola Hotel di Pangkalan Kerinci, 1 Orang Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan dan 1 Orang DPRD Kabupaten Pelalawan. Sedangkan sampelnya yaitu, Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan dan 7 Orang Pengelola Hotel di Pangkalan Kerinci yaitu, Hotel Unigraha, Hotel Fanbinari, Hotel Dikaraya, Hotel Meranti, Hotel Grand, Hotel Aini, Hotel Rian. Jadi sampel yang digunakan adalah seluruh populasi dengan alasan dapat dijangkau dan permasalahan yang dihadapi berbeda.

### 5. Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini pada dasarnya dapat dibedakan atas dua jenis data, yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data utama yang bersumber dari para responden penelitian dilapangan sehubungan dengan permasalahan penelitian tentang pemungutan Pajak Hotel.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang bersumber penelaahan kepustakaan guna mendapatkan dukungan teori berupa pendapat ahli yang dinilai relevan dengan penelitian ini serta peraturan perundang-undangan, buku-buku serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

6. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung di lokasi tentang fenomena-fenomena yang terjadi dan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Dalam observasi ini dilakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, sebab data hasil observasi ini dipandang lebih akurat.

b. Angket

Alat pengumpulan data yang digunakan daftar pertanyaan mengenai pokok masalah penelitian.

c. Wawancara

Untuk melengkapi data yang telah diperoleh melalui angket, dilakukan juga wawancara langsung dengan responden. Dalam hal ini ditujukan kepada, Kepala Dinas Pengelolah Keuangan dan Kekayaan Daerah

Kabupaten Pelalawan, dan Wajib Pajak Hotel di Pangkalan Kerinci, 7 orang.

#### 7. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari kuesioner dan wawancara kemudian penulis kumpulkan dan diklarifikasikan menurut bentuk dan sifatnya. Setelah terkumpul kemudian diolah secara persentase. Selanjutnya dianalisis dan dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan berlaku untuk ditarik kesimpulan akhir secara deduktif yaitu dari keadaan yang umum kepada hal yang khusus. Yang termasuk dalam kesimpulan secara umum adalah analisis yang dapat dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli yang tertuang kedalam tinjauan kepustakaan sedangkan dalam kesimpulan yang khusus adalah peraturan perundang-undangan serta peraturan daerah yang disesuaikan pada lokasi tempat peneliti melakukan dalam penelitian baik berupa subjek dan objek penelitian.

#### 8. Metode Penulisan

Deduktif yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti secara umum, kemudian dianalisa dan disimpulkan secara khusus.



## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang terbagi dalam:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran umum kecamatan Pangkalan Kerinci.

BAB III : Tinjauan umum tentang pajak hotel.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini meliputi pembahasan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dari Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, di Pangkalan Kerinci dan Faktor Penghambat dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel di Pangkalan Kerinci.

BAB V : Kesimpulan dan Saran.

Daftar Pustaka

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KECAMATAN PANGKALAN KERINCI**

#### **A. Profil Singkat Kecamatan Pangkalan Kerinci**

Pangkalan Kerinci adalah Ibukota Kabupaten Pelalawan terletak di Kecamatan Pangkalan Kerinci yang merupakan pemekaran Kecamatan dari Kecamatan Langgam. Pangkalan Kerinci sebagai Ibukota Kabupaten Pelalawan sama halnya dengan ibukota kabupaten lain yang mengalami peningkatan yang sangat pesat baik dari segi pembangunan insfrastuktur dan perekonomian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang pembentukan 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Propinsi Riau yang diresmikan oleh Mentri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan Operasional Pemerintah Daerah tanggal 5 Desenber 1999, salah satu diantaranya adalah Kabupaten Pelalawan yang memiliki luas wilayah 12.490,42 Km2 dan pada awal terbentuknya terdiri dari 4 Kecamatan<sup>23</sup>, yaitu :

1. Kecamatan Langgam
2. Kecamatan Pangkalan Kuras
3. Kecamatan Bunut
4. Kecamatan Kuala Kampar

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang pembentukan 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Propinsi Riau

Sejak Tahun 2001 Kabupaten Pelalawan mengalami pemekaran menjadi 10 Kecamatan yang terdiri dari :

1. Kecamatan Langgam
2. Kecamatan Pangkalan Kerinci
3. Kecamatan Pangkalan Kuras
4. Kecamatan Ukui
5. Kecamatan Pangkalan Lesung
6. Kecamatan Bunut
7. Kecamatan Pelalawan
8. Kecamatan Kuala Kampar
9. Kecamatan Teluk Meranti
10. Kecamatan Kerumutan

Kabupaten Pelalawan terus melaju dan meningkatkan segala pembangunan dengan melakukan pemekaran wilayah dari 10 Kecamatan menjadi 12 Kecamatan, Kecamatan yang baru dimekarkan pada bulan Oktober 2005, adalah

1. Kecamatan Sei Kijang
2. Kecamatan Bandar Petalangan

## **B. Keadaan Geografis dan Keadaan Penduduk**

### **1. letak dan luas**

Pangkalan Kerinci  $\pm 2$  KM dari ibukota kabupaten pelalawan dan  $\pm 75$  KM dari Ibu Kota Propinsi Riau. Luas wilayah Kecamatan pangkalan kerinci adalah  $\pm 616.4 \text{ KM}^2$  yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Kuras
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kerinci Kanan Kab. Siak
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Langgam dan kecamatan Bandar Sekijan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Kuras

Kecamatan pangkalan kerinci terdiri dari 4 Desa 3 Kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Kerinci Kota
2. Kelurahan Kerinci Timur
3. Kelurahan Kerinci Barart
4. Desa Makmur
5. Desa Mekar Jaya
6. Desa Kuala Terusan
7. Desa Rantau Baru

## 2. Topografi

Wilayah pangkalan kerinci berdaratan, dan Bentuk wilayah, tinggi tempat, topologi dan kedudukan wilayah terhadap Khatulistiwa menjadikan iklim Pangkalan Kerinci beriklim tropis, temperatur antara 220C-320C dengan kelembaban antara 80-88% dan curah hujan rata-rata 1500-2000 MM/ Tahun

## 3. Iklim

Bentuk wilayah, tinggi tempat, topologi dan kedudukan wilayah terhadap Khatulistiwa menjadikan iklim Pangkalan Kerinci beriklim

tropis, temperatur antara 22<sup>0</sup>C-32<sup>0</sup>C dengan kelembaban antara 80-88% dan curah hujan rata-rata 1500-2000 MM/ Tahun

#### 4. Penduduk

Salah satu ciri demografi di Indonesia adalah penyebaran penduduk yang tidak merata. Sampai juni 2012 tercatat jumlah Penduduk pangkalan kerinci adalah sebanyak 64624 Jiwa. yang terdiri dari Penduduk Laki-laki 32105 Jiwa dan Perempuan 32519 Jiwa. Jumlah kepala keluarga 14455 kepala keluarga, kewarganegaraan terdiri dari 64624 orang warga Negara Indonesia, 57 orang Warga Negara Asing. Secara keseluruhan Penduduk Laki-laki lebih banyak dibanding Penduduk Perempuan.

### C. Hotel Di Pangkalan Kerinci

Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan berkembangnya perekonomian Pangkalan Kerinci sebagai Ibu Kota Kabupaten Pelalawan dan juga sebagai pusat pemerintahan daerah kabupaten pelalawan, tentu saja akan menambah jumlah pengunjung yang datang dan membutuhkan tempat istirahat dan pertemuan-pertemuan.

Keberadaan hotel di pangkalan kerinci menjadi impestasi yang baik bagi pengusaha di Pangkalan Kerinci dan akan memberikan keuntungan tersendiri bagi Pemerintah Daerah Kabupaten

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 28 tahun 2009 maka pungutan Pajak Hotel adalah merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sebagai salah satu sumber

pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembanguna.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, *Op.Cit*, pasal 32

### **BAB III**

#### **TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK HOTEL**

##### **A. PENGERTIAN PAJAK**

Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dapat di paksakan mempunyai arti, apabila utang pajak tidak di bayar utang tersebut di tagih dengan kekerasan, seperti surat paksa, sita, lelang dan sandera. dengan demikian, ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut.

1. Pajak di pungut berdasarkan Undang-Undang
2. Jasa timbal tidak di tunjukkan secara langsung
3. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Dapat di paksakan (bersifat yuridis)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan

Daerah<sup>25</sup>. Pajak Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD dan tidak boleh bertentangan dengan pajak Pemerintah Pusat serta tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, sebelum diundangkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, Pemerintah Daerah harus memberitahukan kepada Pemerintah Pusat untuk mendapatkan persetujuan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya pemungutan pajak ganda pada Obyek Pajak yang sama. Oleh karena itu penetapan pajak Pemerintah Pusat maupun Pajak Daerah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dari definisi dan penjelasan tentang pajak Daerah sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah adalah;

- a) Pajak Daerah adalah pajak yang diserahkan pengelolaannya oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.
- b) Penyerahan pajak daerah berdasarkan kepada Undang-Undang
- c) Pajak Daerah tidak boleh bertentangan dengan Pajak Pemerintah Pusat.
- d) Pajak Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 dalam menetapkan Pajak Daerah, harus memenuhi kriteria sebagai berikut;

- a) Bersifat Pajak dan bukan Retribusi

---

25 , Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah.



- b) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan,
- c) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum,
- d) Objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan/atau objek pajak Pusat,
- e) Potensinya memadai
- f) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negative,
- g) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
- h) Menjaga kelestarian lingkungan.<sup>26</sup>

Setiap jenis pajak dan retribusi daerah yang diberlakukan di Indonesia harus berdasarkan dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya. Hal ini juga berlaku untuk pajak daerah. Dewasa ini yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah di Indonesia adalah sebagaimana di bawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 23 Mei 1997.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

---

<sup>26</sup> Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah. pasal 2 ayat (4).

Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 20 Desember 2000.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 4 Juli 1997.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 4 Juli 1997.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 13 September 2001.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 13 September 2001.
7. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang pajak daerah.
8. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang retribusi daerah.

Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan<sup>27</sup>. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997, ditetapkan sebelas jenis pajak daerah, yaitu empat jenis pajak provinsi dan tujuh pajak kabupaten/kota :

1. Jenis pajak Propinsi terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2. Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Sarang Burung Walet
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- j. Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997.

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, *Op.Cit* , Pasal 2 ayat (1) dan (2).

Salah satu unsur penghitungan pajak yang akan menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak adalah tarif pajak sehingga penentuan besarnya tarif pajak yang diberlakukan pada setiap jenis pajak daerah memegang peranan penting. Tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu :

1. PKB&KAA ditetapkan paling tinggi 5%;
2. BBNKB&KAA ditetapkan paling tinggi 10%;
3. PBBKB ditetapkan paling tinggi 5%;
4. PPPABTAP ditetapkan paling tinggi 20%;
5. Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%;
6. Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%;
7. Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%;
8. Reklame ditetapkan paling tinggi 25%;
9. Penerangan jalan ditetapkan paling tinggi 10%;
10. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ditetapkan paling tinggi 20%:  
dan
11. Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 20%.<sup>29</sup>

Walaupun ditetapkan batasan tarif pajak yang paling tinggi, terdapat pengaturan yang berbeda tentang penetapan tarif pajak oleh pemerintah daerah antara pajak provinsi dengan pajak kabupaten/kota. Saat ini penetapan tarif pajak provinsi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001

---

<sup>29</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah..

tentang Pajak Daerah, yang menetapkan tarif pajak tertentu yang berlaku sama untuk semua provinsi. Sementara itu, untuk tarif pajak kabupaten/kota Peraturan Pemerintah Nomor 65 menetapkan tarif pajak paling tinggi, yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Penetapan tarif pajak provinsi berbeda dengan penetapan tarif pajak kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Dengan memerhatikan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota, tarif untuk pajak kabupaten/kota dapat ditetapkan tidak seragam. Hal ini antara lain dengan mempertimbangkan bahwa tarif yang berbeda untuk jenis-jenis pajak kabupaten/kota tidak akan memengaruhi pilihan lokasi wajib pajak untuk melakukan kegiatan yang dikenakan pajak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 mengatur tarif pajak yang paling tinggi yang dapat dipungut oleh daerah untuk setiap jenis pajak. Penetapan tarif paling tinggi tersebut bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dad penetapan tarif yang terlalu membebani sedangkan tarif paling rendah tidak ditetapkan untuk memberi peluang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri besarnya tarif pajak yang sesuai dengan kondisi masyarakat di daerahnya, termasuk membebaskan pajak bagi masyarakat yang tidak mampu. Di samping itu, dalam penetapan tarif pajak juga dapat diadakan klasifikasi/penggolongan tarif berdasarkan kemampuan wajib pajak atau berdasarkan jenis objek pajak.

## **B. SISTEM PAJAK DI INDONESIA**

Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia dengan jelas menentukan bahwa sistem

perpajakan Indonesia adalah sistem *self assessment*. Hal ini telah diberlakukan sejak reformasi perpajakan di Indonesia tahun 1983. Penetapan sistem *self assessment* juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Karena karakteristik setiap jenis pajak daerah tidak sama, sistem ini tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak daerah.

Secara umum, sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah adalah sistem *self assessment* dan *official assessment*. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal yang menentukan bahwa pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.<sup>30</sup> Pada cara pertama pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis dan nota perhitungan. Pada cara kedua, yaitu pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak, wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 7.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Apabila wajib pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya kepadanya dapat diterbitkan Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) yang menjadi sarana penagihan pajak. Peraturan Daerah tentang Pajak dapat mengatur ketentuan mengenai:

1. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok
2. pajak dan/atau sanksinya;
3. tata cara penghapusan piutang pajak yang kadaluwarsa;
4. asas timbal balik.<sup>31</sup>

### **C. PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH**

Pemungutan pajak daerah yang saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 mengatur beberapa istilah yang umum digunakan, sebagaimana disebut di bawah ini.

1. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>31</sup> Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah.

2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah.
3. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.



9. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
10. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
11. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta serta kewajiban, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

15. Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak, yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
24. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
25. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, serta mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

27. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.<sup>32</sup>

#### **D. PENGERTIAN PAJAK HOTEL**

pajak hotel di sebut pajak daerah pungutan daerah atas penyelenggaraan hotel.

Hotel adalah Bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan atau fasilitas lainnya dengan di pungut bayaran, termasuk bangunan yang lainnya yang mengatur, di kelolah dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Pengusaha hotel ialah Perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Objek pajak adalah Setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, Objek pajak berupa

a) Fasilitas penginapan seperti gubuk pariwisata (cottage),

Hotel,wisma,losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kost dengan

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997.

jumlah kamar 15 atau lebih menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.

- b) Pelayanan penunjang antara lain Telepon, faksimilie, teleks, foto copy, layanan cuci, setrika, taksi dan pengangkut lainnya disediakan atau dikelola hotel
- c) Fasilitas Olahraga dan hiburan

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel<sup>33</sup>. Wajib pajak hotel adalah Pengusaha hotel<sup>34</sup>.

Dasar pengenaan adalah Jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan tarif pajak ditetapkan sebesar 10%, Masa pajak I (satu) bulan takwim, jangka waktu lamanya pajak terutang dalam masa pajak pada saat pelayanan di hotel.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah. Pasal 1 ayat (8).

<sup>34</sup> *Ibit*, Pasal 1 ayat (9) .

<sup>35</sup> *Ibit*, Pasal 3 ayat (1).

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI**

#### **A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.**

Sejalan dengan diberikannya otonomi daerah yang lebih luas kepada daerah. Pemerintah Indonesia kembali menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemungutan pajak daerah dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada peraturan yang terakhir ini, pemerintah daerah diberi ruang yang lebih luas, untuk lebih leluasa dalam menarik pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah yurisdiksinya, dengan mengeluarkan peraturan-peraturan daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Peraturan pemerintah ini mengatur secara lebih rinci mengenai mekanisme dan tata cara yang lebih operasional mengenai penerapan pajak daerah yang dapat dilakukan oleh

suatu pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun di pemerintah kabupaten/kota.

Seperti halnya pemerintah daerah kota lainnya yang ada di seluruh Indonesia Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan juga memberlakukan beragam jenis pajak daerah. Pemberlakuan jenis-jenis pajak ini tentunya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tentang pajak hotel, sesuai dengan yang teliti oleh penulis dilapangan yaitu terdapat beberapa hotel diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hotel Unigraha (Bintang 3)
2. Hotel Melati;
  - a. Hotel Fanbinari
  - b. Hotel Dikaraya
  - c. Hotel Meranti
  - d. Hotel Grand
  - e. Hotel Aini
  - f. Hotel Rian;

Di Kabupaten Pelalawan aturan yang mengatur untuk pajak hotel adalah Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Dearh, Dalam ketentuan peraturan diatas telah ditentukan sistem dan prosedur pemungutan dari pajak hotel, antara lain meliputi :

# 1. Dasar Pengenaan/ Penghitungan Dan Tarif Pajak Hotel

- a. Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.<sup>35</sup>
- b. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan.<sup>36</sup>

Tabel IV. 1 : Tanggapan responden tentang dasar pengenaan dan tarif pajak hotel tahun 2011 di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

No	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Setuju	7	100%
2	Tidak Setuju	0	0%
Jumlah		7	100%

*Sumber data : Hasil penelitian lapangan, s/d Juni 2012*

Dari tabel di atas, dapat diperoleh gambaran mengenai dasar pengenaan dan tarif pajak hotel di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada wajib pajak hotel, yang termasuk kategori “Setuju” yakni sebanyak 7 orang (100%) responden yang memberikan tanggapannya dan tanggapan responden pada kategori “Tidak Setuju” tidak ada (0%).<sup>37</sup>

Dari tanggapan tersebut dapat diketahui bahwa secara umum, dasar pengenaan dan tarif pajak hotel di Pangkalan Kerinci Kabupaten

<sup>35</sup> Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pasal 6.

<sup>36</sup> Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah *Op Cit*, pasal 7.

<sup>37</sup> Tanggapan responden tentang dasar pengenaan dan pajak hotel di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.



Pelalawan wajib pajak hotel setuju, dikarenakan ketetapan pajak hotel sudah dilakukan dengan mekanisme yang baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yakni maksimal sebesar 10%.<sup>38</sup>

Dasar pengenaan dan tarif pajak hotel di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, menurut salah seorang wajib pajak hotel di Pangkalan Kerinci Ricky.R. sebagai Ops. Manajer hotel Unigarah setuju Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) selain tidak melampaui batas maksimal peraturan perundang-undangan dan juga tidak ada alasan kami sebagai pengalolah hotel di pangkalan kerinci untuk tidak setuju dengan ketetapan peraturan daerah sebut. Karena sama-sama kita ketahui bahwa pajak hotel itu tidak diambil dari pendapatan hotel itu sendiri melainkan dari pengunjung yang menginap dan yang menggunakan fasilitas yang disediakan hotel.<sup>39</sup>

- c. Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten pelalawan
- d. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD
- e. SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

---

<sup>38</sup> UU No.34/200. Pasal 3 ayat (1).

<sup>39</sup> Ricky. ( Ops. Manajer hotel Unigara), *Wawancara*, Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, 14 Juni 2012 .

## 2. Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah.

- a. Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

Tabel IV. 2 : Tanggapan responden tentang pembayaran pajak hotel tahun 2011 di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

No	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Membayar Sendiri	7	100%
2	Dipungut petugas pajak	0	0%
Jumlah		7	100%

*Sumber data : Hasil penelitian lapangan, s/d Juni 2012*

Dari tabel di atas, dapat diperoleh gambaran mengenai pembayaran pajak hotel pada Kantor Dinas Pengelolah Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) bagian pendapatan daerah, termasuk pada kategori “Membayar Sendiri” yakni sebanyak 7 orang (100%) responden yang memberikan tanggapannya dan tanggapan responden pada kategori “dipungut petugas pajak” tidak ada (0%).<sup>40</sup>

Dari tanggapan tersebut dapat diketahui bahwa secara umum, tata cara pemungutan pembayaran pajak hotel di Dinas Pengelolah Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) bagian pendapatan daerah dilakukan oleh petugas pemungut pajak atau membayar sendiri, tetapi

---

<sup>40</sup> Tanggapan responden tentang membayar pajak hotel di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

dalam hal ini wajib pajak cenderung membayar sendiri dalam membayar pajak. Dengan hal diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang tata cara pembayaran pajak hotel tidak sulit, dikarenakan pemerintah berupaya tidak menyulitkan sistem pembayaran wajib pajak hotel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penulis melakukan wawancara dengan Erizal K, Kepala Bagian pendatan di Dinas Pengelolah Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) bagian pendapatan daerah, menyebutkan selama ini pihak Dinas Pengelolah Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) memantau pihak pengelolah hotel di Pangkalan Kerinci sepanjang tahun 2011 tidak ada yang tidak membayar pajak. dalam artian secara keseluruhan pengelolah hotel membayar pajak hotelnya.<sup>41</sup>

- b. Apabila Pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambatlambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- c. Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada poin *a* dan *b* dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- d. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Sanksi yang akan dikenakan bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak berupa :

---

<sup>41</sup> Erizak K, (Kabag, Dinas Pengelolah Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD), *Wawancara*, Pangkalan Kerinci, 18 Juni 2012.

- 1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari saat jatuh tempo Pembayaran.
  - 2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.
  - 3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana pada poin *a* dikeluarkan oleh Pejabat.
  - 4) Apabila pajak yang dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
  - 5) Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari sejak pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan penetapan tanggal pelelangan pada Kantor Lelang Negara.
- e. Pasal 98 ayat (1) berbunyi; Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Pasal 98 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

- f. Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud diatas, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.<sup>43</sup>

Pada poin *d* disebutkan bahwa pembayaran pajak oleh wajib pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas namun dalam peraturan daerah dapat ditentukan lain (Pasal 98 ayat 1 Peraturan Daerah 01 Tahun 2011 Kabupaten Pelalawan Tentang Pajak Daerah), bahwa Kepala Daerah dapat memberikan keringanan pada wajib pajak untuk melakukan pembayaran dengan cara mengangsurnya.

- g. Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- h. Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud diatas (Pasal 98 ayat 1 dan 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 tahun 2011 tentang Pajak Daerah), ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- i. Setiap Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Peraturan Daerah kabupaten Pelalawan Nomor 01 tahun 2011 tentang

---

<sup>43</sup> Pasal 129, Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

pajak, diberikan Tanda bukti Pembayaran dan dicatat dalam Buku Penerimaan.

- j. Bentuk, jenis, isi, ukuran Buku Penerimaan dan Tanda Bukti Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### 3. Tata Cara Penagihan Pajak

- a. Surat teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- b. Dalam Jangka Waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- c. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud diatas pada poin *b* pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- d. Apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.

- e. Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.
- f. Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- g. Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
- h. Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

#### 4. Tata Cara Pengajuan Banding

Pada Pasal 113 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang berbunyi:

- a. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat.
- b. Permohonan banding Permohonan sebagaimana dimaksud pada poin a

diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan surat keputusan keberatan.

- c. Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.
- d. Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan permohonan banding, Bupati/Batara Pejabat wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar Surat Keputusan Keberatan yang keberatan yang diterbitkan.
- e. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus lingkungan peradilan Tata Usaha Negara.<sup>44</sup>

#### 5. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

- a. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dan menyebutkan sekurang-kurangnya :
  - 1) Nama dan alamat wajib pajak;
  - 2) Masa pajak;
  - 3) Besarnya kelebihan pembayar pajak;
  - 4) Alasan yang jelas.
- b. Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan

---

<sup>44</sup> Pasal 113, Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.



pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada poin a harus memberikan keputusan.

- c. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada poin *b* Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- d. Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- e. Pengembalian kelebihan pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- f. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

#### 6. Sanksi Administrasi

Pada pasal 130 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. yang berbunyi; Setiap Wajib Pajak yang dengan sengaja:

- a. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 ayat (2) dan ayat (3);

- b. mempeerlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokkumen lain yang palsu seolah-olah benar, atau tidak menggarkan keadaan yang sebenarnya;
- c. tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan ataupencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program *on-line*;
- d. menolak untuk dilakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 122; atau
- e. tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan daerah; dikenakan sanksi berupa kenaikan sebanyak 400% (empat ratus persen) dari pokok pajakyang terutang.<sup>45</sup>

Beberapa upaya telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan untuk mewujudkan target penerimaan pajak hotel. Secara garis besar upaya ini ditempuh dengan cara melakukan penjaringan wajib pajak hotel, melakukan pembinaan kepada wajib pajak misalnya melakukan dialog dengan wajib pajak hotel, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia melalui penambahan wawasan/pengetahuan di bidang PAD.

Dalam hal perpajakan daerah, dalam UU No. 34 Tahun 2000 Pasa1 4 ayat (5) dinyatakan bahwa setiap peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah terlebih dahulu harus disosialisasikan sebelum ditetapkan. Mekanisme sosialisasi diserahkan kepada pemerintah daerah

---

<sup>45</sup> Pada pasal 130 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

untuk menetapkan.<sup>46</sup> Menurut penulis, mekanisme dan sanksi mengenai peraturan daerah kepada masyarakat sebelum ditetapkan tersebut harus benar-benar dilakukan sosialisasi dengan baik dan tepat sasaran agar peraturan daerah tersebut tidak meresahkan masyarakat karena sebelumnya tidak disosialisasikan dan menjadi tidak tahu.

Hasil wawancara penulis dengan salah satu Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan sejauh ini pihak DPRD dalam hal ini telah melakukan proses dengar pendapat dengan Dinas Pengelolah Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan diantaranya dengan pembahasan tentang nilai dan jumlah yang telah dikontribusikan kedaerah dari hasil pajak hotel, supaya tidak menjadi halangan dan rintangan. Kemudian beliau menambahkan agar setiap petugas pajak harus selalu cermat dan akurat dalam menjalankan peraturan ini agar tidak terjadi penyimpangan.<sup>64</sup>

Dalam hal penetapan pajak hotel, pembayaran pajak hotel dan pengelolaan penerimaan pajak hotel, akan terjadi sinkronisasi dan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Masyarakat akan melakukan pembayaran pajak hotel karena menyadari itulah salah satu kontribusi penting mereka dalam mewujudkan pembangunan daerah dan kesejahteraan mereka. Pemerintah daerah akan membuat peraturan daerah dan melakukan pemungutan pajak hotel serta mengelola penerimaan dari pajak

---

<sup>46</sup> Pasal 4 UU No. 34 Tahun 2000 ayat (5)

<sup>64</sup> Nazaruddin, SH.MH, (Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pelalawan) *Wawancara*, Pangkalan Kerinci, 18 Juni 2012.

tersebut hanya untuk pembangunan dan kesejahteraan daerahnya, di bawah pengawasan DPRD.

Tabel IV. 3 : Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan hasil Pajak Hotel pada Dinas Pengelolah Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Pelalawan Tahun 2011.

Pendapatn Asli Daerah (Rp)	Pajak Hotel (Rp)	%
33.872.124.860,00	1.090.083.608,10	81,30

*Sumber data :Dinas Pengelolah Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan, 28 Juni 2012.*

Dari table diatas dapat diketahui bahwa Pendapata Asli Daerah Kabupaten Pelalawan pada Tahun 2011 mencapai Rp 33.872.860 (Tiga Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah), dengan pendapatan Pajak Hotel sebesar Rp 1.090.608, 10 dengan persentase 81,30%.<sup>47</sup>

#### **B. Faktor Penghambat Keterlambatan Wajib Pajak Menyeter Pajak Hotel Di Kecamatan Pangkalan Kerinci.**

Adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah di Pangkalan Kerinci penulis golongan kedalam bagian sebagai berikut :

---

<sup>47</sup> Erizak K, (Kabag, Dinas Pengelolah Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD), *Wawancara*, Pangkalan Kerinci, 18 Juni 2012.

## 1. Kesadaran Hukum Wajib Pajak

Dalam hal ini tidak ditemukan adanya hambatan. Hal ini dilengkapi dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu pemilik hotel, mengatakan sebagai pengusaha mereka tidak mau menyusah pemerintah, dilakukan kerja sama yang baik. Masalah hambatan tidak ada, penetapan pajak dirasa baik-baik saja, mereka percaya pada Peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Mengenai pengenaan tarif yang ditetapkan dalam peraturan sudah benar, Dinas Pendapatan Daerah sekitar dua atau tiga bulan sekali mendata ulang dan melakukan penetapan pajak yang berbeda-beda sesuai dengan pendapatan yang diterima hotel dari pengguna jasa hotel, namun perubahan dari penetapan pajak tidak jauh dari sebelumnya, ini tidak menjadi masalah bagi mereka.<sup>48</sup>

## 2. Keterlabatan Wajib Pajak Dalam Menyerahkan SPT

Dilihat dari sisi Penyerahan SPT terhadap wajib pajak untuk melaporkan keinstansi terkait dan petugas, pajak penulis mengklasifikasikan yang menjadi hambatan dalam menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;

### a) Penyetoran Pajak Yang Tidak Tepat Waktu ke Kas Daerah

Keterlambatan dalam menyetorkan pajak ke kas daerah juga merupakan faktor penghambatan atas pelaksanaan Peraturan Daerah

---

<sup>48</sup> Weni Noverita (Head FO hotel AINI), *Wawancara*, Pangkalan Kerinci, 12 Juni 2012.

Kebupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah,  
Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel IV.4 : Tanggapan responden tentang keterlambatan dalam pembayaran pajak hotel

No	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Pernah	2	33%
2	Tidak Pernah	5	67%
Jumlah		7	100%

*Sumber data : Hasil penelitian lapangan, s/d Juni 2012*

Dari tabel di atas, dapat diperoleh gambaran mengenai tentang keterlambatan dalam pembayaran pajak hotel pada Kantor Dinas Pengelolah Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) , termasuk pada kategori “Pernah” 2 Orang (33%) responden yang memberikan tanggapannya dan tanggapan responden pada kategori “Tidak Pernah” 5 Orang (67%).

Dari tanggapan responden tersebut dapat diketahui bahwa secara umum wajib pajak tidak melakukan keterlambatan dalam membayar pajak hotelnya. Namun masih ada yang melakukan keterlambatan dalam membayar pajak hotel.

Dalam hasil wawancara penulis dengan pemilik hotel di Pangkalan Kerinci mengungkapkan bahwa mengapa terjadi kembatan

dalam membayar pajak hotel, dikarenakan selama ini kurang diterapkannya sanksi, sehingga wajib pajak hotel ada yang melalaikan kewajibannya untuk membayar pajak hotel tepat waktu.<sup>49</sup>

b) Standar pengawasan dari Dinas Pengelolah Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan.

Standar pengawasan yang pasti terhadap pungutan pajak hotel dari petugas Dinas Pengelolah Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Pelalawan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel IV.5 : Tanggapan responden tentang standar pengawasan terhadap pungutan pajak hotel oleh Dinas Pengelolah Keuangan dan Kekayaan Daerah di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

No	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sudah diterapkan	2	33%
2	Belum diterapkan	5	67%
Jumlah		7	100%

*Sumber data : Hasil penelitian lapangan, s/d 2012*

Dari tabel di atas, dapat diperoleh gambaran mengenai standar pengawasan terhadap pungutan pajak hotel oleh Dinas Pengelolah Keuangan dan Kekayaan Daerah di Pangkalan Kerinci Kabupaten

---

<sup>49</sup> Rita (pemilik hotel), Wawancara, Pangkalan Kerinci, 12 juni 2012.

Pelalawan termasuk pada kategori “Sudah diterapkan” 2 Orang (33%) responden yang memberikan tanggapannya dan tanggapan responden pada kategori “Belum diterapkan” 5 Orang (67%).

Atas dasar diatas, dapat dilihat secara garis besar bahwa sanksi bagi wajib pajak hotel yang terbukti bersalah belum berjalan dengan baik, karena tanggapan dari responden secara umum menjawab belum diterapkannya sanksi.

Dalam hasil wawancara penulis dengan Kepala Bagian pendapatan di Dinas Pengelolah Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan, disebutkan sanksi pajak hotel belum diterapkan, memang di peraturan daerah ada disebutkan namun masih longgar. Dalam hal ini pihak Dinas Pengelolah Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan masih kurang memperhatikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan pihak hotel. Rencananya kedepan akan diterapkan sanksi bila ada ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik hotel atau penginapan. Sebelum itu akan dibentuk dulu tim yustisi yang diambil dari pihak kepolisian dan yang lainnya yang bersangkutan tentang pajak.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Erizak K, (Kabag, Dinas Pengelolah Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD), *Wawancara*, Pangkalan Kerinci, 18 Juni 2012.



### 3. Peraturan daerah tentang pajak daerah

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sudah dapat mencapai hasil yang baik, hal ini dapat dilihat dari pencapaian PAD yang diatas rata-rata. Penulis melihat Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tersebut berjalan dengan baik, Namun penulis melihat adanya bagian Pasal dalam Peraturan Daerah tersebut belum dapat dijalankan dengan baik, yaitu tentang perhitungan dan penetapan pajak hotel yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak dan kurangnya pengawasan dari pihak Dinas Pengelolah Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan. Memang tidak menjadi masalah, tapi diharapkan hal tersebut dapat memudahkan kerja dari pemerintah. Kelemahan ini juga dapat menyebabkan kerugian dari salah satu pihak.

Dari hambatan diatas dapat dilihat bahwa tidak begitu besar hambatan yang terjadi mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang mengatur aturan pelaksanaan pajak hotel di Kabupaten Pelalawan. Masalah hambatan diupayakan sedapat mungkin kedepannya dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan untuk menuju kabupaten pelalawan yang lebih maju.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan pemungutan pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dilihat dari tata cara pendaftaran dan pendataan, tata cara perhitungan dan penetapan pajak hotel, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, prosedur penyelesaian banding dan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Dari hasil penelitian terhadap tanggapan responden dapat dilihat adanya sedikit faktor-faktor penghambat dari pelaksanaan pemungutan pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tersebut , penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan pemungutan pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, di Pangkalan Kerinci berjalan sudah optimal meskipun ada sedikit kejanggalan dari segi pelaksanaannya.
2. Hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Adapun hambatan dalam pelaksanaan Pemungutan pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 tahun 2011 tentang pajak Daerah penulis menyimpulkan yaitu tentang perhitungan dan penetapan pajak hotel yang

dilakukan sendiri oleh wajib pajak, kurangnya kemampuan petugas pemungut pajak hotel sehingga perhitungan dan penetapan pajak hotel yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak.

## **B. Saran**

1. Hendaknya Kepala Dinas Pengelolah Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan, semakin meningkatkan pendataan terhadap wajib pajak sesuai dengan jenis objek pajak dan melakukan evaluasi terhadap pembukuan atau laporan hasil pemungutan pajak hotel sesuai dengan jumlah wajib pajak, supaya hasil pajak pada hotel dapat lebih tinggi dan dapat dilakukan peningkatan kemampuan petugas pemungut pajak hotel dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan khusus, mengadakan sosialisasi terhadap wajib pajak hotel, dan memberikan sanksi baik kepada petugas pemungut pajak yang melakukan penyimpangan dari hasil pemungutan pajak hotel maupun kepada wajib pajak hotel yang tidak membayar tepat waktu atau menunda pembayaran pajak hotel tersebut.
2. Kepada wajib pajak hotel, hendaknya melengkapi data dan pembukuan sendiri supaya petugas pajak dari Dinas Pengelolah Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan tidak sulit dalam melakukan tugas.
3. Kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan agar selalu menggali potensi daerah dan memberdayakannya sebagai sumber pendapatan daerah untuk kemakmuran masyarakat Kabupaten Pelalawan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-buku

Asri M Saleh (ed), *Kolaborasi Opini Guru Besar Hukum Tata Negara*, Bina Mandiri Press, Pekanbaru, 2005.

*Politea dan Politicos Kuarte Ide-ide Ahli Negara dan Praktisi Politik* , Bina Mandiri Press, Pekanbaru, 2004.

Ambran Y.S. Chaniago, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2002.

Bohari, *Penghantar Hukum Pajak*, PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Hadi Setia Tunggal, *Tanya Jawab tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, HARVARINDO, Jakarta, 1999.

Hari Sabarno, *Memadu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Mr Nuraini “*Kamus Praktis Bahasa Indonesia*” Karya Ilmu, Surabaya

Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintahan Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*, PT Grasindo, Jakarta, 2008.

Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2004

W.Riadwan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT Gramedia Indonesia, Jakarta, 2006.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan keempat.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

## **C. Jurnal / Makalah**

Syofiarti, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Mahkamah Volume 20 No.1, 2008.